

## Peran Blockchain terhadap Lembaga Zakat bagi Pertumbuhan Perekonomian Suatu Negara

Ibnu Habib Wahyudi<sup>1</sup>, Tata Felina Yolanda<sup>2</sup>,

Fanny Asyifa Br Lumban Tobing<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[ibnuhabibwah@gmail.com](mailto:ibnuhabibwah@gmail.com)<sup>1</sup>, [felinatata1@gmail.com](mailto:felinatata1@gmail.com)<sup>2</sup>

[fnysyf@gmail.com](mailto:fnysyf@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Digitalization is a new phenomenon at the beginning of the 21st century, which combines technology and civilization and sets a good example for the ummah, namely through smart and precise methods. It is time for the introduction of the blockchain method at zakat institutions to be a solution to Islamic problems such as the collection and distribution of zakat financing. The purpose of this study is to provide an example of the possibility, opportunity and capability of implementing the blockchain method in zakat institutions, especially in Indonesia. The integration of blockchain into the economic and monetary system creates lucrative opportunities, conversely, blockchain can pose a threat to the economic and monetary system. The purpose of this research is to find out the impact of the blockchain. This research method is a literature study that examines the literature on various topics and balances it with studies of phenomena from various countries. through dynamic technological advances, especially with the emergence of blockchain technology. Based on the results and research findings, it can be said that blockchain has both positive and negative effects. The positive effects of blockchain on the functioning of the monetary system are the convenience, security and stability of the financial system, which can affect economic growth, while the negative effects of blockchain change the system/policy that previously occurred to be decentralized. and losses mainly from government agencies. Through the advancement of Dynamism technology, especially emerging blockchain technology, the zakat environment will be more efficient for blockchain providing a sustainable, timely, secure and open data decentralization method. Various issues that can be suggested to advance this practice include increasing the staffing capacity of zakat institutions, increasing awareness of zakat obligations as well as examples of digitizing zakat, collaboration between Opz and collaboration with various platforms.*

**Keywords:** *blockchain, zakat, state economy.*

### ABSTRAK

Digitalisasi adalah fenomena baru awal abad ke-21, yang menggabungkan teknologi dan peradaban serta memberi contoh ummat dengan baik yaitu melalui metode yang pintar juga tepat. Sudah saatnya pengenalan metode blockchain di lembaga zakat menjadi solusi atas persoalan Islam semacam penghimpunan juga distribusi pembiayaan zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah demi memberi contoh tentang kemungkinan, kesempatan dan kapabilitas penerapan metode blockchain di lembaga zakaat khususnya di Indonesia. Integrasi blockchain ke dalam sistem ekonomi dan moneter menciptakan peluang yang menguntungkan, sebaliknya, blockchain dapat menjadi ancaman bagi sistem ekonomi dan moneter. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari blockchain. Metode penelitian ini adalah studi pustaka yang mengkaji literatur tentang berbagai topik dan menyeimbangkannya dengan kajian fenomena dari berbagai negara. melalui kemajuan teknologi yang dinamis, utamanya dengan timbulnya teknologi blockchain. Berdasarkan hasil dan temuan penelitian, dapat dikatakan bahwa blockchain memiliki efek positif dan negatif. Efek positif blockchain terhadap fungsi sistem moneter adalah kenyamanan, keamanan, dan stabilitas sistem keuangan, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan efek negatif blockchain mengubah sistem/kebijakan yang sebelumnya terpusat menjadi terdesentralisasi. dan kerugian terutama dari instansi pemerintah. Melau

kemajuan teknologi Dinamisme, utamanya timbul teknologi blockchain, lingkungan zakat akan lebih dimajukan untuk blockchain menyediakan metode desentralisasi data yg berkelanjutan, tepat waktu, aman dan terbuka. Berbagai persoalan yg bisa disarankan untuk memajukan praktik ini antara lain meningkatkan kapasitas kepegawaian kelembagaan zakat, meningkatkan kesadaran kewajiban zakat serta contoh digitalisasi zakat, kolaborasi antara opz dan kolaborasi dengan berbagai platform.

Kata kunci: Blockchain, Zakat, Perekonomian Negara

## PENDAHULUAN

Inovasi sistem keuangan terdesentralisasi, yang dimulai dengan munculnya teknologi blockchain, adalah salah satu perkembangan paling tidak terduga dalam kebijakan moneter global selama dekade terakhir (Pieters, 2016). Dimulai abad ke 21 menimbulkan revolusi tinggi dalam ilmu pengetahuan serta teknologi dunia. Sejak akhir dekade awal pada abad 21, perkembangan teknologi sudah dikaitkan bersama sektor jasa financial, dimana sejak saat itu diperluas hingga mencakup inovasi teknologi di bidang financial, perbankan, ritel, pendidikan, serta layanan sosial. Sebuah hasil peneliti Deutsche Bank menunjukkan sebuah gerakan yang digambarkan sebagai digitalisasi sektor keuangan di sektor financial, yg mana mayoritas teknologi memakai internet digunakan di sektor financial.

Ide baru fintech menjadi lebih umum juga famous, contohnya akses ke tabungan bank yg sebelumnya limit, melalui mobile banking, uang elektronik, dll menjadi praktis. Teknologi Blockchain adalah sebuah struktur data yang terhubung dalam sebuah rantai, sederhananya sebuah blockchain sebagai penghubung antara pengguna tanpa perantara dengan data pengguna lainnya (M, 2009). Inovasi ini juga dapat dilihat dari perspektif kelembagaan sosial misalnya ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, serta Yayasan) dimulai menggunakan pendamping digital untuk mendukungnya. Ekonomi Islam merespon beberapa kasus dimana beberapa negara menghadapi bermacam krisis keuangan yang menyebabkan inflasi besar yang diisyaratkan dengan harga-harga yang kokoh serta bertahan lama, dengan senantiasa menghormati nilai-nilai fundamental sistem ekonomi masa kemudian. Norma-norma utama harmonisasi serta pengasihan, penyeimbang serta keadilan, serta sebagian prinsip filosofis bahkan nilai-nilai Islam instrumental, misalnya distribusi zakat dan jaminan sosial lainnya. Ini untuk menyelesaikan masalah dunia.<sup>1</sup>

Zakat ialah salah satu rukun Islam selaku salah satu wujud amal sosial yang harus dicoba oleh tiap muslim. Zakat dapat mensucikan jiwa dari keserakahan, keegoisan dan kesengsaraan, mensucikan hak orang lain dan berpengaruh positif terhadap ekonomi rakyat melalui berantai kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, juga peningkatan pembelian rakyat. Zakat adalah contoh ibadah keuangan dan sosial yang untuk mengurangi resiko dalam rakyat. Kelolaan biaya zakat yg benar dan benar bisa menciptakan pendistribusian penghasilan yg adil. Di sisi lain, di antara sekitar 1,8 miliar orang, Islam ialah agama yang tumbuh dengan strategis melebar ke seluruh dunia. Menurut perkiraan, nilai jumlah umat Islam

---

<sup>1</sup> Adaptasi Teknologi и съавт., „THE 10th ISLAMIC BANKING, ACCOUNTING AND FINANCE INTERNATIONAL CONFERENCE 2022 ( i BAF 2022 )“ 2022 (2022): 172–180.

akan melebihi jumlah komunitas kristen dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu contoh dari pertumbuhan komunitas ini ialah terjadi peningkatan demand produk dari seorang Muslim yang sah, utamanya di negara-negara mayoritas Islam kayak Indonesia. Oleh karena itu, menurut aspek syariah modern, konsep transaksi keuangan harus transparan, saling menguntungkan dan yang terpenting sesuai dengan aturan syariah Islam. Selain potensi pengembangan lembaga zakat yang didukung oleh media digital, peluang yang lain dilihat pada jumlah biaya ZISWAF yang bisa bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, yang menerima zakat diharapkan meningkat rata-rata 26,64 persen selama lima tahun (Komitee Nasional Keuangan Islam, 2020).

Berkas yang diterima dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) ditunjukkan ialah biaya zakat yang dikumpul meningkat menjadi 65,2 % selama periode lima tahun dari 2015 hingga 2019, dari 3,70 triliun rubel menjadi 10,12 triliun rubel pada 2020 kecuali itu, IPPZ (Indikator Potensi Zakat) data ditunjukkan kalau pendapatan zakat di Indonesia berdasarkan keseluruhan dapat menjadi Rp 244,94 miliar atau USD 16,81 miliar pada tahun 2019. Berkat itu ditunjukkan dengan angka zakat tertinggi ialah bidang zakat pendapatan dengan angka Rs. 140,07 triliun rupiah diikuti zakat duit 59,76 triliun, zakat pertanian 20,79 triliun dan zakat ternak 10,51 triliun (Badan Amil Zakat Nasional, 2019). Di tempat yang lain, pembiayaan yang menerima zakat masih belum maksimal. Berdasarkan BAZNAS, penghasilan biaya zakat tahun 2020 masih tercapai 11,07 triliun rupiah atau 5,31% dari potensi, jadi 233,84 triliun rupiah.

Dari potensi yang sangat besar tersebut, hanya 4,5 persen atau sekitar Rp 9 triliun serta dapat dikelola oleh kelembagaan zakat. Jika Amil yang amanah, handal dan profesional mampu menghimpun dan mengelola dana zakat dengan baik dan mendistribusikannya secara benar dan merata, sesungguhnya zakat dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat. Hal ini telah dibuktikan secara empiris didalam sejarah, ialah saat waktu pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ketika biaya zakat yang dikelola para amil mampu mengentaskan angka kemiskinan dalam masa yang relatif singkat. Selain berpengaruh, meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan rakyat kepada tataran ekonomi kecil, biaya zakat bisa mempunyai peluang bagi perkembangan ekonomi. Ahmed Shaiikh & Ismail menemukan yaitu perbandingan zakat kepada PDB melebihi indeks kerendahan kemiskinan kepada PDB lain hal di tiga negara di mana garis kemiskinan diputuskan sebanyak 2,25 USD per hari. Dengan kata lain, jumlah total sumber daya yang terkumpul dari potensi pengumpulan zakat 17 negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) rata-rata demi membiayai gabungan dari kemiskinan 17 negara OKI.

Maahat dan Waarokka (2013) menunjukkan yaitu pemerintah di negara-negara Islam mesti secara serius mempertimbangkan maksimalisasi kegunaan zakat untuk tabungan demi perkembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi, dan sebahagian percaya yakni zakat menjamin pemerataan dan kesejahteraan perekonomian yang adil. makhluk distribusi modal. Menurut Yusoff (2012), zakat mempengaruhi dana zakat di kawasan Malaysia.

Dengan zakat bisa menumbuhkan perekonomian yang baik di kawasan Pakistan. Perkembangan fintech tidak lepas dari perspektif Islam sebagai negara

mayoritas di Indonesia. Meskipun pemerintah melarang perdagangan mata uang kripto sesuai Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Aturan Teknis Penyelenggaraan Pasar Peninggalan Raga Kripto di Bursa Berjangka. Beberapa lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa tentang penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar atau investasi. Meskipun blockchain dan cryptocurrency adalah hal yang berbeda, keduanya masih berhubungan. Crypto digunakan sebagai mata uang digital dan blockchain sebagai teknologi penyimpanan data digital dan media yang terkait dengan transaksi crypto.

Diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang penggunaan blockchain dari sudut pandang Islam, berdasarkan kajian Esrat (2018), yang memungkinkan penggunaan blockchain di lembaga zakat sebagai salah satu inovasi operasional baru, namun dengan cara yang lebih mendalam. Investigasi menyeluruh dan penelitian menyeluruh dan terperinci diperlukan. Berdasarkan latar belakang tersebut dan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi dan mengkaji blockchain dari perspektif Islam.

Pada masa revolusi 4.0, Indonesia dapat beradaptasi dengan penggunaan teknologi finansial. Secara meluas, kegunaan Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI), dan Internet of Things (IoT) dengan blockchain dapat mengubah lanskap seluruh industri dengan cepat dan mendalam. Persoalan ini disebabkan ini dapat memberi manfaat yg besar untuk peningkatan kinerja industri dan mencapai kinerja yg baik dengan cara yg hemat. Sebagai lembaga yg mengelola biaya masyarakat, keberadaan teknologi kayak pemakaian blockchain akan lebih menolong Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) demi peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Sebagian riset sudah memandang konsep blockchain serta pelaksanaannya pada organisasi nirlaba di negeri tersebut. Teerlink (2019) melaksanakan riset tentang adopsi sistem blockchain di organisasi non-pemerintah (LSM) nirlaba, atau seringkali organisasi non-pemerintah (LSM), dan menemukan bahwa adopsi sistem blockchain menawarkan beberapa peluang penting, yaitu peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyimpanan berkas transaksional serta operasional, smart contract untuk pembiayaan berkelanjutan, yang dapat meningkatkan kepercayaan donor dan tolok ukur bagi LSM, yang pada gilirannya meningkatkan alokasi biaya antara LSM, bisa peningkatan standart laporan. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoba mengaitkan system blockchaine di 10 area organisasi demi macam proyek juga pelaksanaan dengan tujuan untuk melihat efektivitas sistem itu. Pengamatan yang percaya diri eksperimen itu ialah yakni tahun-tahun awal implementasi blockchaine dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa saling berhubungan dengan adanya kerja sama yang baik dan sehat antara institusi dalam organisasi. Selain itu, Santooso et al. Membuat penelitian dengan system blockchaine untuk mengelola zakat dengan mengambil sampel 100 org yang terdiri yaitu peneliti, pegiat keuangan syariah, amil zakat dan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bisa menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat juga penggunaan system blockchaine bisa meningkatkan nilai kredibilitas kelembagaan zakat. Kecuali itu keterbukaan bisa mendorong juga memperkuat kepercayaan rakyat dengan pihak lembaga.

Dengan latar belakang bermacam pendahuluan yang sudah dijelaskan, tertarik untuk ditelaah lebih detail urgensi juga kemungkinan pengenalan sistem blockchain ke dalam kelembagaan zakat, khususnya di Indonesia. Kajian ini memiliki visi untuk melihat mendalam juga menilai bagaimana potensi juga skill peningkatan biaya zakat melalui teknologi digital dan didukung oleh sistem blockchain terkait dengan hal-hal dan regulasi terkait fokus Indonesia. Kajian ini diimbangi dengan menilai kajian-kajian mengenai fenomena tersebut di belahan dunia.

## TINJAUAN LITERATUR

### Blockchain

Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, blockchain berarti block chain. Blockchain bisa juga didefinisikan selaku catatan gabungan blok yang terus meningkat dengan tiap blok ditautkan ke nilai hash dari blok lebih dahulu. Suatu blok terdiri dari kumpulan transaksi dengan stempel waktu serta hash dari blok lebih dahulu.

Sederhananya, konsep blockchain merupakan sistem pencatatan transaksi digital. Blockchain secara permanen mencatat seluruh transaksi yang dicoba. Sistem terletak dalam database publik yang diucap novel besar ataupun ledger. Novel besar ini dipecah transaksi ditaruh dalam blok serta diteruskan ke jaringan peer-to-peer di mana tiap node menaruh kopian novel besar. Semacam pusat informasi ataupun basis informasi blockchain menaruh data elektronik dalam wujud digital serta sanggup memelihara catatan transaksi yang nyaman serta terdesentralisasi.<sup>2</sup>

Adanya sistem yang aman dan transparan menawarkan banyak keuntungan bagi teknologi blockchain di berbagai industri. Blockchain menawarkan beberapa keuntungan yang membuat internet berharga, seperti: menjamin transaksi berjalan yang benar, transfer kepemilikan yang lebih mudah ke token, dll.

Blockchain ialah sistem basis data terdistribusi terbuka yang membuat transaksi terbesar pada buku besar terdistribusi yang mana masing-masing pihak mempunyai akses ke informasi. Lebih dalam lagi, blockchain adalah rantai berkas transaksional antar pemakai, diletakkan dalam blok, di mana setiap blok menyimpan sejumlah berkas tertentu dengan enkripsi menggunakan teknik hashing kriptografi. Jika pemakai mau membuat transaksi, dia mesti memberi tahu semua pemakai akses lainnya kemudian mereka dapat memverifikasi berkas keaslian operasi tersebut. Setiap pemakai mempunyai kopian buku besar itu, lalu semua transaksi dapat dilihat dan diakses oleh semua pihak dan dalam hal penipuan, aktivitas penipuan, atau pereetasan tidak dimungkinkan. Kecuali keterbukaan, keandalan, dan kelacakan biaya yang akurat dan terperinci, susunan jaringan blockchain serta terdesentralisasi bisa juga mengurangi pembiayaan transaksi melalui menghilangkan penghubung potensial dari proses transaksi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> „407\_BLOCKCHAIN-DALAM-EKONOMI-ISLAM.pdf“, (sebuah tinjauan pustaka "23, no. 5 (2021): 85-95.

<sup>3</sup> Dhiaeddine Rejeb, „Blockchain and Smart Contract Application for Zakat Institution : A Conceptual Study“ 5, 6 p 3 (2020): 20–29.

Blockchain menjadi system management yang bisa sebagai alat bagi kelembagaan zakat dalam merencanakan juga memantau pendanaan serta distribusi. Tidak ada unsur non-syar'i dalam konsep blockchain, yang menjadi penghubung antara aktivitas pemangku kepentingan dan eksekutif. Kegiatan ini sebenarnya dapat memberikan masalah bagi semua yang terlibat. Dengan demikian, undang-undang blockchain dibolehkan. Salah satu aturan yg sebagai perintah Rasulullah SAW ialah menjaganya tetap sederhana.

Kebijakan moneter Islam

Yakni system moneter mengalami berbagai perkembangan selama berabad-abad dan secara empiris dan historis paling baik dipelajari dari semua lembaga lainnya. Dinar merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai Tukar Emas dan Perak pada zaman Rasulullah SAW.

Nilai tukar 1 dirham ke dinar relatif stabil tapi nilai tukar terganggu oleh ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Misalnya stabil Pada masa Bani Umayyah (41/662-132/750), nilai tukar antara dinar dan dirham adalah 1: 12 dan selama dinasti Abbasiyah (132/750-656/1258) antara lima belas kali lain, nilai tukar dirham dan dinar Fluktuasi terendah berada pada level 1:35-1:50. Ketidakstabilan nilai tukar menyebabkan koin buruk ditarik dari peredaran atau uang baik diganti dengan yang buruk. Dalam literatur tradisional, fenomena ini disebut Hukum Gresham. Ini terjadi pada masa pemerintahan Mamluk (1263-1328) ketika mata uang moneter (tembaga) berpindah dan memaksa keberadaan koin emas dan perak. Setiap sistem ekonomi memiliki nilai instrumentalnya sendiri. System economy capitalism memiliki nilai-nilai instrumental, yaitu: persaingan sempurna, keluasaan untuk masuk dan keluar pasar tidak ada batasan, dan informasi juga bentuk pasar monopolistik secara atomik. Sementara itu, nilai-nilai instrumental dari system ekonomi Marxis ialah: ada perencanaan economy yg tersentralisasi juga mekanis disertai kepemilikan bersama proletariat atas faktor-faktor produksi. Dalam sistem ekonomi Islam, nilai alat-alat strategis yang mempengaruhi perilaku ekonomi umat Islam adalah: Zakat, Wakaf, Larangan Riba, Kerjasama Keuangan.

Zakat

Zakat adalah seberapa banyak uang yang harus diimbalkan oleh setiap Muslim jika kondisi tertentu terpenuhi. Karena zakat adalah salah satu rukun Islam, itu dibayarkan kepada mereka yang memiliki hak (asnaf). Zakat adalah sarana kemakmuran dari sudut pandang sosial dan ekonomi. Keadilan keuangan.

Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti kesucian, kebaikan, keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan. Dinamakan Zakat karena mengandung harapan barokah, mensucikan jiwa dan menyuburkannya dengan berbagai kebajikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq:5) Pentingnya pertumbuhan menurut zakat menunjukkan bahwa pengeluaran zakat merupakan sebab tumbuh

dan berkembangnya kekayaan, pelaksanaan zakat mendatangkan banyak pahala.<sup>4</sup> Padahal maknanya yang suci menunjukkan bahwa tujuan zakat adalah untuk membersihkan jiwa dari keburukan, kejahatan dan dosa. Al-Qur'an mengatakan:

“Ambillah zakat dari harta mereka, karena dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. at-Taubah [9]: 103). Menurut Kitab Al-Hâwî, al-Mawardi Menurut Kitab Al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan mengambil nama-nama tertentu dari sifat-sifat tertentu dan memberikannya kepada golongan tertentu menurut sifat sifat tertentu.

Pembayar zakat disebut muzak. Mereka yang menerima zakat disebut mustahik.

Padahal dalam Ketetapan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang diberikan oleh seorang islam atau badan islam kepada mereka yang berwenang memperoleh menurut hukum Islam. Zakat dikeluarkan dari harta sendiri. Namun, kewajiban membayar zakat tidak berlaku untuk semua harta. Syarat pengumpulan dana zakat adalah :

- a) properti itu sepenuhnya dimiliki oleh pemiliknya;
- b) Aset adalah aset yang dapat tumbuh;
- c) yaitu uang masuk nishab tergantung jenis hartanya;
- d) harta karun melewati lift; dan
- e) Pemilik Bebas Utang.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan informasi sekunder yang dikumpulkan dari bahan pustaka, atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan tulisan ilmiah lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan informasi dari literatur dan buku sebagai topik utama. Metode kualitatif adalah penelitian yang dikerjakan dengan mengumpulkan data nyata dan mendapatkan informasi berupa catatan dan uraian.

Literatur yang digunakan untuk mengumpulkan data berasal dari penelitian sebelumnya seperti jurnal, buku referensi dan dokumen online tentang peran blockchain dalam instrumen Zakat moneter Islam. penelitian ini dibuat melalui kajian literatur yg mendallam mengenai digitalisasi zaakat melalui system blockchaiin. Kajian tersebut mencoba menjelaskan dan mendeskripsikan urgensi dan peluang optimalisasi instrumen moneter syariah, yaitu kelolaan pendanaan zakat dan kontribusiinya kepda ekonomi, bersamaan ilustrasi gambar system digitalisasi blockchaiin. Selain itu, tujuan dari kajian ini adalah untuk menunjukkan kemauan masyarakat Indonesia, kelompok kepentingan dan organisasi pengelola zakat secara kebersamaan untuk memajukan pengembangan kelolaan zakaat di indonesia lebih lanjut. Reepon kelembagaan zakatt merujuk pada BAZNAS yang saat ini menerapkan teknologi blockchain.

---

<sup>4</sup> Afifah Nur и сьавт., „Blockchain zakat : An integrated financial inclusion strategy to manage Indonesia ’ s potential zakat funds“ 25, 6p 1 (2022): 89–112.

BAZNAS diharapkan dapat sepenuhnya mengimplementasikan semua fungsi blockchain, termasuk pembangunan jaringan, dalam tiga tahun ke depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Biaya zakat juga dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di berbagai negara berkembang, juga sebagai negara Islam, sudah mempromosikan juga merancang strategi pembangunan demi tercapainya hal penting.

Kemajuan perekonomian berkelanjutan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Dari sudut pandang Islam, pembangunan memegang peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan. Pengendalian kemiskinan ialah penanggung jawab moral juga sosial kepada setiap orang dalam fiqh Muamalah. Yusoff (2012) mengatakan kalau zakat bisa dipakai menjadi bahan penting demi mempromosikan kemajuan umat. Pembiayaan dana zakat untuk penguatan SDM bisa meningkatkan kualitas kehidupan penerimanya, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pertumbuhan zakat dapat memiliki nilai positif dalam jangka pendek sebagai peningkatan status sosial dan kualitas masyarakat. Tentang pelatihan Mustahiq. Didalam waktu yang panjang, bahwa ini bisa meningkatkan konsumsi, investasi, dan demand tenaga kerja, sehingga memacu Mustahiq menjadi muzaki.

Kehidupan sosial yang lebih baik bisa dimaknai sebagai harapan bagi perkembangan umat, juga pendidikan bisa dijadikan ketentuan dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Islam mempunyai solusi dari saluran dana sosial terkhusus zakat, maka Indonesia mempunyai peluang tinggi di dalam pendanaan sosial Islam. Pusat Kajian Strategi BAZNAS juga mempublikasikan di Indonesian Zakat Outlook 2019 kalau peluang zakat menjadi Rp 243,84 triliun pada tahun 2019. Di tempat lainnya, World Giving Index memberi Indonesia predikat sebagai negara dengan bangsa muslim terbanyak di dunia. Data BAZNAS juga menunjukkan penerimaan zakat terus tumbuh, meningkat rata-rata 37,2 % dalam masa 2003-2018. Perlu diketahui bahwa penghimpunan biaya zakat nasional meningkat sebanyak dua puluh empat % didalam lima tahun terakhir, maka bisa diketahui yakni bahwa zakat merupakan alat juga sangat memungkinkan demi terpenuhinya kebutuhan rakyat yang miskin, terutama pada saat dibutuhkan. pandemi seperti itu.

UU Penatausahaan Zakat (UU) No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa tujuan penatausahaan zakat adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan yang berkaitan dengan penatausahaan zakat dan untuk mengusahakan manfaat dari peningkatan zakat - Memaksimalkan zakat. kemudian terciptanya kesejahteraan sosial juga mengentaskan kemiskinan.

Dalam rangkaian undang-undang itu dijelaskan terkait proses kelolaan juga pendistribusian biaya zakat tidak hanya ditujukan demi terwujudnya kenyamanan fakir miskin/Mustahiq, namun juga bertujuan demi peningkatan efektifitas dan efisiensi layanan kelembagaan dalam pengelolaan Zakat yang dikelola oleh Amil Zakat. - Lembaga atau badan.

Mediator zakat harus digunakan untuk mengatasi berbagai masalah sosial, baik sosial maupun ekonomi. Biaya zakat bisa dialokasikan untuk kegiatan kerja



produktif seperti pendanaan unit usahawan mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dari berbagai perspektif dan fenomena zakat, banyak peneliti telah mempelajari potensi dampak dana zakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Kurniawati (2004) memperkirakan banyak peneliti telah mempelajari potensi dampak dana zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dari berbagai perspektif dan fenomena zakat. Kurniawati (2005) menghitung keunggulan Zakaat berada di Indonesia sebesar Rp. 7,132 triliun.

Firmansyah (2010) menetapkan besaran zakaat seminimalnya 2,5 % berasal setiap sektor ekonomi wilayah atau produk domestik bruto daerah (FRDP) dan menghitung peluang zakat dibawah ini :

1) Peningkatan zakat untuk pertanian adalah 2,5 persen dari produk domestik bruto. nilai zakat sektor pertanian, 2) kadar zakat sektor pertambangan sebesar 2,5 persen dari nilai produk domestik bruto sektor pertambangan, dan 3) kadar zakat sektor lainnya masing-masing sebesar 2,5 persen. Selain itu, penelitian Firdaus (2012) menemukan potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 217 triliun atau 3,4 persen dari PDB Indonesia.

2). Penerapan sistem digital untuk meningkatkan kinerja lembaga zakat. Di sektor keuangan syariah, penerapan prinsip digital dalam sistem berbagai sektor bisa memfasilitasi juga peningkatan efektivitas dan efisiensi kelembagaan. Dengan mengadopsi blockchain menjadi sebuah sistem, ini bisa dipastikan keamanan, transparansi, juga efektivitas dana transaksi. Kecuali itu, blockchain bisa berkurangnya kemungkinan korupsi, manipulasi, dan risiko. Adopsi Blockchain bisa dimulai dengan mengenalkan ulama Islam ke teknologi blockchain dengan konsep, pengetahuan, dan perspektif mereka tentang Maqasid al-Shari'ah.<sup>5</sup>

Blockchain diperkenalkan dengan sistem akuntansi finansial terdesentralisasi yang efisien, aman, dan transparan. Teknologi new yang revolusioner tersebut belum biasa disebabkan blockchain adalah teknologi informasi.

Ketika informasi diperbarui, itu segera dan secara langsung digunakan demi kesemua pengguna jaringan pada saat yang bersamaan. Penggalangan pendanaan zakaat diperkenalkan di berbagai belahan dunia Islam. Otoritas keagamaan di setiap negara melakukan promosi, pengumpulan, dan distribusi zakat secara benar dengan peraturan Islam dan mulai memimpin dalam memperkenalkan konsep digital. Di Indonesia misalnya, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berkolaborasi bersama penyedia layanan teknologi dari website e-commerce dan dompet digital. Pada masa 2019, ada 7 kelembagaan zakaat juga bersama-sama dengan situs lembaga belanja online Tokopedia, Shopee juga toko online yang lain, antara lain BAZNAS, Rumah Yatim, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, LAZISMU, LAZ Al-Azhar, NU Care (LAZIS NU) dan Indonesia Inisiatif Zakat (IZI). Selain itu, tren hadiah digital jelas meningkat. Aplikasi Gojek di platform GoZakat yang

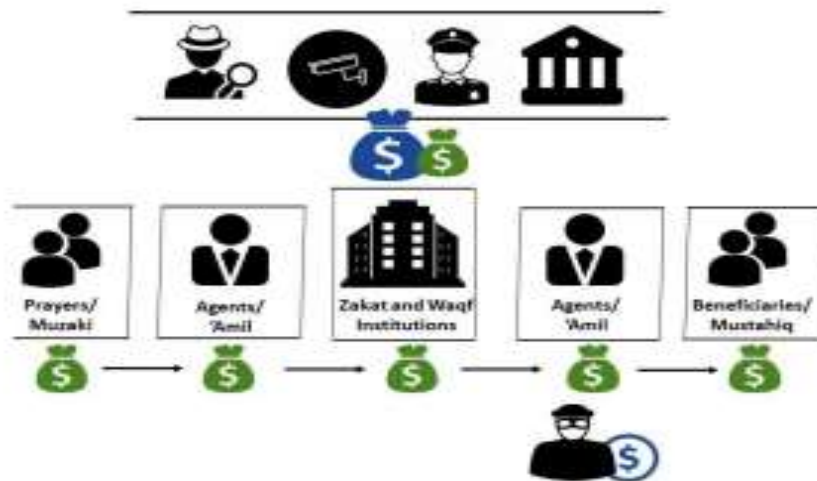
---

<sup>5</sup> Cut Niswatul Chaira, Hafas Furqani, dan Dara Amanatillah, „Ekobis : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam ( Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual )“ (2019).

bermitra dengan LAZ melaporkan peningkatan transaksi Zakat hingga 17 kali lipat sejak tahun 2019 (Komnas Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020).

Sebuah studi menemukan beberapa masalah di kelembagaan zakat yg lain, antara lain inefisiensi, kurangnya keterbukaan didalam cara pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana, perbedaan pandangan ilmiah tentang cara penanganannya, dan birokrasi yg luas. masalah Zakaat ialah kewajiban amall tahuunan untuk semua masyarakat iislam. Tugas tersebut diukur dengan batas indeks.

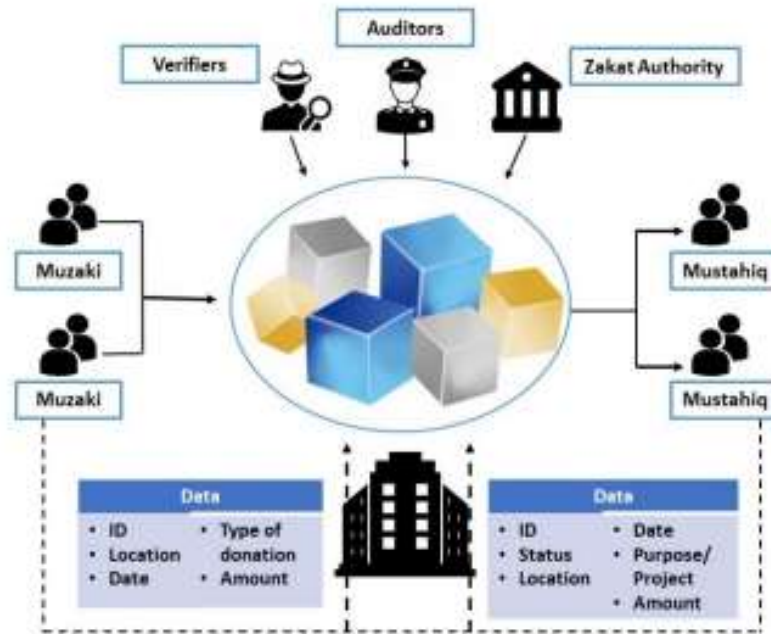
Gambar I Model Tradisional Blockchain Penyaluran Dana Zakat



Ada celah dalam system operasi danaa zakatt tradisiional demi acara kurangnya informasi dan moral hazard. Operasi multisistem dengan banyak pihak Muzak, Amil, Mustahiq dan otoritas pengawasan membuat sulit untuk melacak kebenaran dan ketakbersyaratan dari setiap langkah transaksi. Data a dengn system terpusat kemungkinan hal itu. Memang, praktik-praktikyag membuka kesempatan praktiik kebohongan juga kelalaian yang bisa merugiikan sutuu kelembagaan ataupun organiisasi, khususnya organisasii Islamm pengelola danaa zakatt, harus dihindarii.

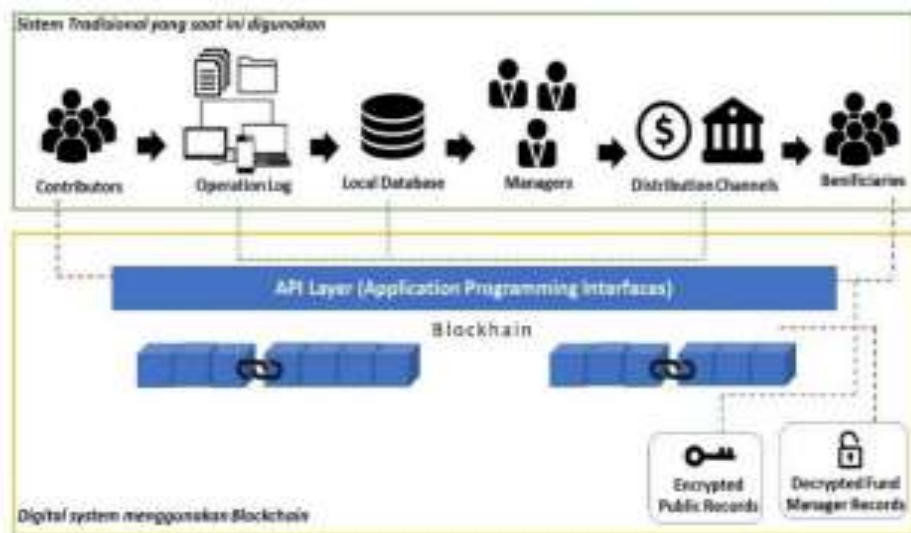
Gambar II

Gambar Digitalisasi Blockchaiin penyaluuran danaa zakatt



Lebih mudah Divisualisasikan dengan :

Gambar III Visualisasi Perbandingan Model Tradisional Dan Digital



Tujuan penerapan blockchain ialah demi meruntuhkan tembok antar yg memangku keperluan yang berbeda juga menyediakan satu sumber informasi, database/system yang bisa dipegang semua orang. Penggunaan smart contract memfasilitasi distribusi muzak yang terbuka. Kecuali itu, rasa percaya pada amil semakin tumbuh. Kelembagaan zakat pun tidak memungut beban verifikasi yang lumayan mahal, juga pengawas zakat dibantu dengan sistem verifikasi yang sederhana. Di tempat lain, pendanaan tersebut bisa tersalurkan dengan baik sehingga mencapai mustahiq menerima zakat. Selain itu, sistem zakat blockchain mempunyai peluang yang signifikan dalam mempercepat nilai dan penerima biaya.

Kemampuan Indonesia mengadaptasi sistem digital Terkait penghimpunan dan pengelolaan dana Zakat, OPZ sudah memiliki strategi umum yang secara bertahap beradaptasi dengan perspektif digital. Digitalisasi proses penghimpunan dana zakat diimplementasikan melalui berbagai layanan seperti website, aplikasi berbasis android untuk vending machine seperti m-money.<sup>6</sup>

Terkait proses pengelolaan dana zakat, lembaga zakat telah mengadopsi proses digitalisasi untuk meningkatkan pengelolaan, akuntabilitas dan efisiensi yang baik. Misalnya, BAZNAS menggandeng perusahaan startup dengan nama Desto untuk mengembangkan aplikasi zakat berbasis teknologi. Program tersebut bernama iZakat dan dipresentasikan pada agenda tahunan World Zakat Forum (WZF) di Malaysia pada tahun 2018. Ini merupakan salah satu upaya digitalisasi aspek administrasi OPZ (Badan Amil Zakat Nasional, 2020). Penyesuaian teknis terkait penyaluran dana antara lain pembuatan nomor identifikasi Mustahik bekerja sama dengan Kemensos untuk penggunaan unified database (BDT) agar OPZ dapat mendistribusikan dana Zakat secara efisien tanpa tumpang tindih dengan subsidi sejenis.

Dalam praktiknya, sebagai lembaga zakat teramai di Indonesia, BAZNAS telah menerapkan sistem strategi penggalangan dana digital di beberapa platform, yaitu platform menguntungkan ataupun tak menguntungkan seperti aplikasi crowdfunding dan agen pembayaran, platform inovasi, media sosial, dan platform kecerdasan buatan.<sup>7</sup> Selain itu, data menunjukkan porsi dana zakat terus tumbuh secara digital, dari hanya 1% di tahun 2016 menjadi 24% di tahun 2020 (Beik, 2020).

Selain dari itu, sistem blockchain sendiri tentunya dapat digunakan di Indonesia. BAZNAS akan mengadopsi platform teknologi blockchain untuk mengelola pengelolaan zakat, yang berada pada fase 1 (fase awal) pada tahun 2020. Fase 2 memprediksi BAZNAS dapat sepenuhnya mengimplementasikan fungsinya pada tahun 2021. Selain itu, diharapkan platform ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh di BAZNAS tingkat provinsi dan daerah pada tahun 2022. 3d. H. Jaringan. Sebagai tantangan berikutnya yang sangat potensial, Indonesia perlu menciptakan platform digital blockchain yang dapat membuat penghubung antara Mustahiq, Amil dan Muzak serta seluruh layanan Zakat dalam satu aplikasi, sehingga ekosistem Zakat pada akhirnya akan semakin terbuka di tingkat nasional. bahkan.

Lembaga zakat dapat dengan mudah menarik muzak dengan membuka program kerja melalui lembaga pendidikannya. Melalui pendataan ini, warga kulit hitam yang memenuhi/memenuhi syarat dapat mendaftar dan menyampaikan kebutuhannya melalui platform yang dibuat sendiri. Dari sisi donasi, muzak dapat mengarahkan dananya ke OPZ sesuai dengan preferensi masing-masing muzak. Selain itu, seluruh laporan pengelolaan zakat dapat disajikan secara real time,

---

<sup>6</sup> Khalida Urfyia, „DIGITAL SYSTEM BLOCKCHAIN SEBAGAI STRATEGI UNTUK OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT : STUDI“ 17, 6p 02 (2021): 83–95.

<sup>7</sup> Billi Anidiatama Rahmawan, Nazmi Aulia Robbani, dan Ade Yunita Mafruhah, „DAMPAK CRYPTOCURRENCY TERHADAP SISTEM MONETER : SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA SISTEMATIS“ 26, 6p 2 (2022): 97–106.

sehingga inovasi teknologi lainnya dapat menciptakan integrasi database zakat nasional dan menghasilkan big data zakat.

Indonesia sebagai negara Asia Tenggara menjadi pusatnya Keuntungan di dunia antara lain 1).Jumlah penduduk terbanyak lembaga zakat. beragama Islam, 2) Support penuh pemerintah, 3) lembaga zakat yang penting dan 4)Tanggung jaawab para pimpinan lembaga zakat. Berdasarkan tantangan dan kekuatan tersebut, beberapa strategi harus diterapkan di sini untuk memanfaatkan potensi yang ada :

- a) Meningkatkan kapasitas staf lembaga zakat  
Lembaga zakat Indonesia terus menghadapi tantangan dalam kelembagaan dan pengelolaan dana zakat. Hasil kajian strategi penghimpunan dana zakat di OPZ Yogyakarta oleh Sulastingsihin dan Utam (2013) menyimpulkan bahwa citra OPZ di Yogyakarta masih minim dan rendah. Hal itu karena Muzaki curiga terhadap perilaku dan pola pikir pengelola zakat/sumber daya manusia pejabat, data yang tidak akurat, lembaga zakat yang tidak menginventarisasi data dengan baik, dan buruknya kualitas sumber daya manusia kepercayaan masyarakat.
- b) Meningkatkan kesadaran kewajiban zakat dan digitalisasi zakat  
Ada beberapa alasan mengapa orang tidak mau membayar Zakat termasuk kurangnya pengetahuan tentang manfaat besar zakat, ketakutan akan penyalahgunaan dana sumbangan oleh pembayar hutang, kurangnya hukum zakat yang ketat, kurangnya kepercayaan pada lembaga terkait dan mentalitas tidak membantu orang lain melalui perantara. menerima zakat. rendahnya kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat, berdasarkan keyakinan dan pengetahuan mereka tentang zakat. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membayar zakat dapat menambah pengetahuan dan juga memperkuat iman umat muslim. Meskipun zakat adalah rukun Islam dan wajib dipenuhi para umat muslim, namun tidak seluruh masyarakat memahami peran zakat dalam menggerakkan perekonomian negara. Visi sosial suatu bangsa tercermin ketika tingkat ketimpangan sosial dan kemiskinan rendah. Jika dana zakat dihimpun dan disalurkan secara optimal, maka dapat menghilangkan mata Rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan pada gilirannya memberikan kesejahteraan sosial.. Selain itu, digitalisasi zakat sangat penting. Masyarakat perlu memahami bahwa pengelolaan zakat sebenarnya lebih efisien dengan sistem digital seperti blockchain. Digitalisasi zakat dapat meningkatkan keamanan pengumpulan dan pengelolaan zakat serta mengurangi biaya transaksi. Amir dan pemerintah sebaiknya membuat gambaran sosialisasi zakat digital yang mudah dipahami masyarakat.
- c) Kerjasama terpadu antar wilayah OPZ  
Data tahun 2017 menunjukkan ada 603 organisasi/lembaga pengelola zakat di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 548 BAZNA (48 BAZNA provinsi dan 514 BAZNA kabupaten/kota) dan 55 LAZ (19 LAZ negara, 11 LAZ provinsi, dan 25 LAZ kabupaten/kota) (Badan Amil Zakat Nasional,

- 2018). Padahal, masih banyak organisasi dan lembaga zakat di masjid-masjid daerah yang keberadaan dan jumlahnya tidak bisa dilacak. Untuk memaksimalkan peran zakat, pemerintah harus memiliki database semua organisasi yang terlibat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.
- d) Sinkronisasi data memudahkan negara untuk melihat kelayakan dan pelaksanaan pengelolaan dana riil. Selain itu, penyaluran zakat dapat lebih luas dan merata, bantuan tidak hanya terfokus pada mustaka tertentu dan tidak terbatas pada wilayah tertentu. Data terintegrasi memudahkan pemerintah untuk memantau dan mensosialisasikan peraturan terkait.

## KESIMPULAN

Kemungkinan penerapan teknologi blockchain dapat mempermudah memecahkan permasalahan ekonomi negara dalam mengentaskan kemelaratan dan mencapai keadilan sosial dengan memungkinkan penggunaan data secara menyeluruh dan melacak seluruh pengumpulan dan distribusi zakat. Teknologi ini memastikan donasi dan dana zakat sampai ke penerima yang tepat.

Adanya alam hal ini, blockchain sistem digital adalah sebuah fenomena yang lahir dari keinginan untuk membuat transaksi menjadi lebih handal, aman dan transparan. Implementasi blockchain di lembaga zakat sangat dibutuhkan karena dapat menginspirasi kepercayaan dari semua orang mulai dari Muzak hingga Amil kepada Mustahiq. Dengan berkembangnya Iptek yang dinamis, pengumpulan dan pendistribusian zakat menjadi lebih sistematis dan dapat lebih ditingkatkan karena blockchain menyediakan konsep desentralisasi informasi real-time yang permanen, aman dan transparan untuk menghadapi stabilisasi non-bank. Sistem keuangan, termasuk lembaga OPZ yang mengelola operasionalnya.

Blockchain dapat membantu orang memahami bagaimana zakat didistribusikan. Tantangan pengumpulan zakat tradisional adalah kurangnya efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi (Noordin, 2018). Menggunakan sistem blockchain meminimalkan masalah ini karena proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dapat dipantau, diaudit, dan kebal terhadap segala jenis modifikasi data (Elasrag, 2019) Sebagai pelopor ekonomi Islam yang potensial, Indonesia melihat dirinya berada dalam posisi untuk beradaptasi dengan sistem ini. Aturan dan pedoman yang jelas tentang topik ini di tingkat lokal, regional, dan internasional akan ideal untuk mengoptimalkan teknologi blockchain, seperti kepatuhan dompet digital. Namun, untuk mengembangkan model ini baik untuk lembaga zakat maupun aspek keuangan Islam lainnya, cendekiawan Islam harus mengembangkan strategi yang jelas dan ringkas mengenai beberapa aspek teknis seperti kontrak pintar. Beberapa hal yang dapat dipromosikan dalam mempromosikan praktik ini antara lain peningkatan kapasitas kepegawaian lembaga zakat, peningkatan kesadaran tentang Zakat dan konsep digitalisasi Zakat, kerja sama terintegrasi antar OPZ, dan kerja sama dengan berbagai platform digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajuna, Luqmanul Hakiem, Kebijakan Moneter Syariah, и A Pendahuluan. „Kebijakan Moneter Syariah“ (2017).
- Chaira, Cut Niswatul, Hafas Furqani, и Dara Amanatillah. „Ekobis : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam ( Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual )“ (2019).
- Nur, Afifah, Risanda A Budiantoro, Rahmad Hakim, и Febrianur Ibnu. „Blockchain zakat : An integrated financial inclusion strategy to manage Indonesia ' s potential zakat funds“ 25, no. 1 (2022): 89–112.
- Rahmawan, Billi Anidiatama, Nazmi Aulia Robbani, и Ade Yunita Mafruhah. „DAMPAK CRYPTOCURRENCY TERHADAP SISTEM MONETER : SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA SISTEMATIS“ 26, no. 2 (2022): 97–106.
- Rejeb, Dhiaeddine. „Blockchain and Smart Contract Application for Zakat Institution : A Conceptual Study“ 5, no. 3 (2020): 20–29.
- Teknologi, Adaptasi, Pengurusan Zakat, Kajian Konseptual, Amelia Nur, Natasha Nazeri, Fakulti Ekonomi, и Universiti Kebangsaan. „THE 10th ISLAMIC BANKING , ACCOUNTING AND FINANCE INTERNATIONAL CONFERENCE 2022 ( i BAF 2022 )“ 2022 (2022): 172–180.
- Urfiyya, Khalida. „DIGITAL SYSTEM BLOCKCHAIN SEBAGAI STRATEGI UNTUK OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT : STUDI“ 17, no. 02 (2021): 83–95.
- „407\_BLOCKCHAIN-DALAM-EKONOMI-ISLAM.pdf“, (sebuah tinjauan pustaka "23, no. 5 (2021): 85-95.